

**PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENANGANAN TANGGAP DARURAT PADA BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Muhammad Harits

NPP. 29.0050

Asdaf Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: haritsmuh09@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: Most of the area in Aceh Besar Regency consists of forest, making it prone to forest and land fires. This disaster is a disaster that occurs every year causing casualties and substantial losses. Based on the high potential for forest fires in Aceh Besar District, it is necessary for local government efforts to handle forest and land fire disasters, especially emergency response efforts in the event of a disaster. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the role of the Regional Disaster Management Agency of Aceh Besar Regency in handling the emergency response to forest and land fires in Aceh Besar Regency, to find out the inhibiting factors in the implementation of emergency response handling and the efforts made to overcome the inhibiting factors in handling forest and land fire emergency responses. **Method:** The method used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were obtained through interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used is data reduction, presentation and conclusion drawing. **Result:** This study shows that the role of the Regional Disaster Management Agency in handling the emergency response to forest and land fires in Aceh Besar District is quite good, although there are some that are not optimal. All aspect indicators are quite good except for the indicators of budget availability and employee quality which are still not optimal **Conclusion:** The handling of the emergency response to forest and land fires by BPBD has been going well but not yet optimal. Factors hampering the emergency response to the forest and land fires include the COVID-19 pandemic, inadequate human resources and infrastructure, both in quality and quantity, as well as a minimal budget and lack of public awareness to protect the environment. efforts to overcome obstacles, namely coordinating by planning and proposing an increase in the budget as well as adding and improving the quality of human resources

Keywords: Role, Emergency Response, Forest and Land Fires

ABSTRAK

Latar Belakang: Sebagian besar wilayah di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari hutan mengakibatkan rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Bencana ini menjadi bencana yang tiap tahun terjadi menyebabkan timbulnya korban jiwa dan kerugian cukup besar. Berdasarkan tingginya potensi kebakaran hutan di Kabupaten Aceh Besar, maka perlu adanya upaya pemerintah daerah dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan khususnya upaya tanggap darurat pada saat terjadi bencana. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar, mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penanganan tanggap darurat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat dalam penanganan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. **Hasil Penelitian:** Penelitian ini menunjukkan peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar sudah cukup baik walaupun ada beberapa yang belum optimal. Semua indikator aspek sudah cukup baik kecuali indikator ketersediaan anggaran dan kualitas pegawai yang masih belum maksimal. **Kesimpulan:** Penanganan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan oleh BPBD sudah berjalan baik namun belum optimal. Faktor yang menghambat tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan ini antara lain adanya pandemi covid-19, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas serta anggaran yang masih minim dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. upaya dalam mengatasi hambatan yaitu melakukan koordinasi dengan melakukan perencanaan dan pengusulan peningkatan anggaran serta penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

Kata Kunci: Peranan, Tanggap Darurat, Kebakaran Hutan dan Lahan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah hutan yang cukup luas mengakibatkan potensi tinggi terjadi bencana kebakaran hutan dan berakibat fatal jika tidak ditangani dengan penanganan yang baik dan sistematis. Kebakaran hutan dan lahan jika dilihat dari faktor alam dapat terjadi karena adanya sambaran petir yang menghasilkan percikan api yang dapat berawal dari kebakaran dan juga dari aktifitas vulkanis seperti terkena lahar ataupun juga dari lahar panas, gunung berapi, selain itu dibawah tanah/ground fire pada daerah tanah gambut juga dapat membuat kebakaran pada saat terjadinya musim kemarau. Untuk faktor non alam itu sendiri disebabkan oleh manusia seperti memanfaatkan musim kemarau untuk memanfaatkan sebagai kebakaran hutan dengan tujuan membuka lahan baru contoh lainnya adalah dengan membuang puntung rokok dengan bara api yang masi menyala. Bencana kebakaran adalah salah satu bencana yang sering terjadi di provinsi Aceh. Provinsi Aceh mempunyai jumlah hutan yang luas sehingga ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah daerah guna menjaga hutan tersebut agar tetap asri dan hijau dan menghindari dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kebakaran hutan dan lahan 5 tahun terakhir bahwa luas sebaran kebakaran hutan dan lahan tertinggi pada pada tahun 2016 Yaitu seluas 9.158,45 Ha dan luas sebaran hutan terendah yang terbakar adalah pada tahun 2021 (januari-agustus) sebesar 634,00 Ha.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.974,12 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 310.811 jiwa dan luas hutan sebesar 3.346.940 Ha. Jumlah penduduk yang meningkat dan permukiman yang relatif aman terbatas, memaksa manusia untuk memperluas ke daerah yang lain yang mungkin rentan terhadap bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Aceh Besar seperti koordinasi untuk melakukan pemantauan titik api melalui satelit agar dalam pemadaman pada saat tanggap darurat dapat tepat sasaran. Berbagai upaya pemadaman dilakukan diantaranya dengan membentuk satuan tugas kebakaran hutan dan lahan gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan TNI/POLRI satgas gabungan ini tetap memantau situasi melalui posko siaga bencana yang terdapat di daerah rawan

terjadinya kebakaran hutan dan lahan walaupun masih ditemui berbagai kendala diantaranya kekeringan yang cukup panjang disebabkan oleh musim kemarau, selain itu kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan tersebut Kesenjangan Masalah yang Diambil.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan karena memiliki wilayah hutan yang cukup luas yaitu sebesar 3.346.940 Ha. Adanya pertumbuhan penduduk yang pasti terjadi menunjukkan kebutuhan untuk tempat tinggal semakin meningkat. Jumlah penduduk yang meningkat dan permukiman yang relatif aman terbatas memaksa manusia untuk memperluas ke daerah yang lain yang mungkin rentan terhadap bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya disebabkan oleh alam tapi juga dapat disebabkan oleh kesengajaan manusia membakar sedikit untuk membuka lahan namun semakin luas karena lepas kendali. Luasnya wilayah hutan mengakibatkan sulit mengendalikan api yang merambat pada saat terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi kapan saja dan dibutuhkan kesiagaan dan persiapan yang maksimal oleh berbagai instansi terkait salah satunya BPBD Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut juga membutuhkan ketersediaan anggaran dan sumber daya hingga sarana prasarana yang memadai namun kebutuhan tersebut masih sangat terbatas mengakibatkan penanganan menjadi sedikit terlambat yang membuat lebih banyak kerugian yang diterima.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mendapatkan referensi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun konteks bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian Iskandar (2020) yang berjudul Peran Badan penanggulangan Bencana Daerah. dalam menanggulangi bencana kebakaran. di kecamatan Mandahara kabuapten Janjung Jabung Timur. Penelitian ini menyampaikan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum maksimal dalam melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran. Penelitian Rangga Lamara (2020) yang berjudul Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB dalam penanggulangan Bencana Gempa Bumi. Penelitian ini menyampaikan peranan BPBD dalam menanggulangi bencana gempa bumi di pulau Lombok Ada beberapa kendala dilapangan pada saat menghadapi bencana gempa bumi pada tahun 2018 silam yaitu: masih kurangnya koordinasi lintas sektor yang belum berjalan dengan optimal, karena koordinasi atau komunikasi ini adalah bagian penting dalam penanganan bencana. SDM yang juga terbatas, lokasinya yang sangat luas dan membutuhkan sumberdaya dari luar daerah. Hal ini di sebabkan karena anggota dari BPBD dengan segala keterbatasannya sehingga membutuhkan sumber dari luar seperti PMI dan alat berat untuk mengevakuasi korban bencana gempa bumi. Penelitian Aziz Darmanto (2019) yang berjudul Peran Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Dalam menanggulangi kebakaran di permukiman. Hasil dari penelitian tersebut adalah Peran Dinas Penanggulangan Kebakaran. dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi kebakaran di Kelurahan Penjaringan berdasarkan tugas pokok yang meliputi pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Peran-peran. tersebut dilakukan dengan prioritas program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman serta menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di lingkungan masyarakat. Penelitian fatmah (2019) yang berjudul Model Mitigasi Kebakaran Berbasis Masyarakat. Dari Hasil penelitian dilakukannya memperlihatkan model menanggulangi permasalahan kebakaran yang yang dilaksanakan oleh aparat

pemerintah dengan memberdayakan masyarakat melalui Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar). Namun model ini kurang efektif karena keorganisasian Balakar tidak berjalan disebabkan oleh faktor 42 honor, status bekerja, dan penduduk musiman. Penelitian dari Sugipto geong dkk, 2018 menunjukkan bahwa BPBD Kota Samarinda telah menjalankan perannya dengan cukup optimal, BPBD Kota Samarinda lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana melakukan kerja sama dengan TNI dan POLRI serta dinas-dinas terkait yang tergabung dalam SKPD Kota Samarinda, untuk penyebarluasan informasi tentang kebencanaan melalui media sosial, poster, sosialisasi di kelurahan/kecamatan serta pemasangan spanduk himbauan di ruas-ruas jalan Kota Samarinda.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaannya terletak pada lokus dan judul penelitian yang peneliti lakukan yaitu mendeskripsikan peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan tanggap darurat pada bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Teori yang peneliti gunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu yakni pendapat menurut Soerjono Soekanto (2002) yang mengemukakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan mengenai peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan tanggap darurat pada bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara spesifik melalui data primer maupun sekunder yang diperoleh sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara sistematis dengan menyiapkan pedoman wawancara terhadap 6 orang informan yang terdiri dari kepala pelaksana BPBD, sekretaris BPBD, kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD, kabid kedaruratan dan logistik BPBD, kasubbid kesiapsiagaan dan damkar serta masyarakat (dalam hal ini masyarakat Kabupaten Aceh besar yang Bermukim di daerah rentan kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 2 orang). Adapun teknik analisa data yang peneliti gunakan yaitu dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002) yang mengemukakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mendeskripsikan peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar menggunakan teori dari pendapat menurut Soerjono Soekanto (2002) yang mengemukakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 Hak

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan peranannya tidak akan terlepas dari hak-hak yang harus diperoleh dalam menjalankannya tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana. Hak itu sendiri memiliki beberapa indikator yaitu: ketersediaan anggaran, ketersediaan fasilitas, serta jumlah dan kualitas pegawai.

1. Ketersediaan anggaran

Ketersediaan mengandung arti keadaan dimana yang dibutuhkan tersedia atau dengan kata lain kesiapan suatu sarana baik barang, tenaga, modal, dan anggaran untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Ketersediaan anggaran memberikan kekuatan bagi jalannya kegiatan baik itu sebagai penunjang sarana prasarana, ataupun penunjang bagi petugas. Sumber daya keuangan (dana) dapat dikatakan efektif apabila dapat mencukupi atau bahkan melebihi serta mendukung bagi kegiatan dan bagi petugas. Dalam proses penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Aceh Besar menggunakan dana dari tanggap darurat BPBD Kabupaten Aceh Besar kemudian memperoleh bantuan dari dana APBK dan jika sifat bencananya besar maka akan ditalangi dananya oleh dana dari BPBA. Kabupaten Aceh Besar pada tahun anggaran 2021 mendapatkan alokasi dana pada awalnya sebesar Rp 7.250.378.700. Kemudian melalui perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 6.669.590.125. Dengan demikian berkurang sebesar Rp 580.788.575. Dengan rincian sebagai berikut: Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.905.076.935, dan Belanja Langsung Rp 4.764.513.190.

2. Sarana dan prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana merupakan kelengkapan hal-hal atau fasilitas yang mendukung berlangsungnya suatu pekerjaan dalam perkantoran. Sarana dan prasarana adalah dua hal yang berbeda tetapi berkaitan dengan sangat erat. Dimana sarana adalah fasilitas yang berwujud seperti mesin, perabotan, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak berwujud akan tetapi sangat mendukung dalam proses bekerja seperti gedung kantor, rumah dinas, asuransi, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasarana dari kantor BPBD Kabupaten Aceh Besar belum begitu memadai karena kelengkapan yang masih kurang. Rata-rata sarana dan prasarana yang dimiliki berada dalam kondisi yang baik serta jumlah yang sebanding dengan kebutuhan yang nantinya akan digunakan akan tetapi ada beberapa sarana dan prasarana yang tersedia ada yang pada kondisi tidak baik atau rusak namun jumlahnya relative sedikit sehingga hal tersebut tidak terlalu mengganggu kegiatan aktivitas perkantoran di BPBD Kabupaten Aceh Besar. Terkait belum memudahinya sarana dan prasarana tersebut diakibatkan karena pengaruh bencana kebakaran hutan dan lahan yang selalu berubah-ubah tiap tahunnya walaupun sarana dan prasarana yang disiapkan sudah diperhitungkan namun biasanya keadaan dilapangan berbeda menyebabkan jumlah sarana dan prasarana kurang dari kebutuhan ideal.

3. Jumlah dan kualitas pegawai

Ketersediaan personil/anggota dibutuhkan baik itu untuk anggota di kantor maupun untuk pelaksanaan di lapangan. Oleh sebab itu, hak ketiga adalah memastikan ketersediaan personil secara lengkap. Ketersediaan personil merupakan kelengkapan orang-orang atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi/kantor untuk mencapai suatu tujuan, dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Untuk ketersediaan personil pemadam kebakaran saat ini BPBD Kabupaten Aceh Besar kekurangan personil dikarenakan wilayah Aceh Besar yang luas kadang pada saat terjadinya kebakaran cenderung kewalahan karena cakupan wilayah aceh besar yang luas. BPBD Aceh Besar memiliki 67 personil pemadam kebakaran yang dibagi ke delapan pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tiap tiap posnya memiliki jumlah personil yang berbeda beda berdasarkan wilayah dan kebutuhan di tiap posnya, setiap personil piket yang ada di tiap tiap pos stand by 24 jam, tiap shift piket diisi oleh 4 orang petugas yang terdiri dari orang operator dan 1

orang supir. Pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran pun tidak rutin dilaksanakan setiap tahun dan yang mengikuti pun tidak mencakup semua petugas pemadam kebakaran tetapi pelatihan bagi masyarakat sudah dilaksanakan mulai dari sosialisasi dan penyuluhan pemadaman api kepada anak-anak usia dini sebagai bentuk mitigasi dan menimbulkan kesadaran sedini mungkin tentang tanggap darurat jika terjadinya bencana kebakaran. Jadi dapat disimpulkan dari segi keterampilan petugas belum efektif karena belum adanya pelatihan tahunan yang harus dijalankan sebagai evaluasi dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran, pada proses perekrutan pun belum ada regulasi khusus yang mengatur perekrutan tenaga pemadam kebakaran.

3.2 Kewajiban

Selain mendapatkan hak, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar juga harus melaksanakan kewajibannya sehingga peranan dari suatu instansi bisa tercapai. Hal tersebut tertuang dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bahwasanya setiap lembaga departemen dan non departemen Menyusun rencana strategis dengan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran dimana perencanaan tersebut menjadi kewajiban bagi lembaga departemen dan non departemen untuk dilaksanakan. Dari hasil penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar terungkap bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Dimana Peraturan Daerah yang merujuk pada pembentukan dari Badan ini memuat mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar. Adapun kewajiban yang harus dilakukan yaitu :

1. Peraturan daerah

Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum akan adanya BPBD Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, peraturan ini pun menjadi acuan dalam perencanaan program. Dalam pembentukannya setiap instansi harus memiliki dasar hukum. Selain itu, peraturan daerah ini berfungsi sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjelaskan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya. Kewajiban BPBD Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini yaitu melaksanakan segala kegiatan manajemen bencana sesuai dan harus berpedoman pada peraturan daerah yang sudah dibuat dan ditetapkan.

2. Tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pelaksana dari pemerintah daerah, yang mana pelaksana tugas dan penanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan berupa Sekretaris Daerah secara *ex-officio* dan secara administrasi oleh Kepala Pelaksana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar memiliki tugas pokok dan fungsi, adapun tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut, maka ia juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi norma-norma seperti norma hukum, agama, Hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya. Selain itu, ia juga harus mematuhi disiplin dan kode etik aparatur serta standar operasional prosedur yang berlaku. Dalam bertugas, BPBD Aceh Besar selalu berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan qanun tersebut, terlihat jelas bahwa peranan BPBD Aceh Besar sangat diperlukan terutama untuk pelaksanaan Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan yang ada di kabupaten Aceh Besar sehingga api pada kebakaran dapat dipadamkan dan tidak banyak berdampak.

3. Tujuan organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar memiliki suatu visi dan misi, adapun visinya yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang Siaga, Tangguh dan Peduli Serta Aman dari Bencana”. Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa akan datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dalam lingkup penanggulangan bencana, Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah berdasarkan melalui visi dan misi yang sudah dibuat, maka ditetapkanlah tujuan-tujuan serta sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Perumusan tujuan ini dimaksudkan agar BPBD Kabupaten Aceh Besar bisa secara tepat dan efektif mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki. Sasaran merupakan perincian dari tujuan secara lebih terukur yang mana nantinya dapat dicapai dalam jangka waktu tahunan.

4. Program organisasi

Program organisasi merupakan rangkaian kegiatan manajemen penanggulangan bencana yang dibuat dan direncanakan secara sistematis sesuai anggaran tahunan yang diperlukan. Program organisasi bertujuan agar pelaksanaan manajemen bencana dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan dapat di evaluasi jika terdapat kekurangan sehingga program tahun berikutnya dapat lebih baik. Adapun program kegiatan manajemen bencana khususnya penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar telah termuat dalam Rencana Kerja tahunan. Program organisasi BPBD Kabupaten Aceh Besar berjalan dengan baik tiap tahunnya namun adanya beberapa keterbatasan yang mengakibatkan program tersebut tidak dapat dioptimalkan. Keterbatasan tersebut berpengaruh mengakibatkan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar masih menjadi bencana yang sering terjadi. Adanya pandemic covid-19 juga mempengaruhi beberapa program organisasi tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya anggaran yang diterima yang disebabkan karena refocusing anggaran untuk penanganan pandemik.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak positif kepada masyarakat di daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, dimana masyarakat telah memahami langkah-langkah penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan melalui edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan. Sama halnya dengan penelitian Iskandar (Iskandar, 2020). Peran pemerintah atau program instansi terkait sangat menentukan kapasitas masyarakat dan tingkat kekompakan pemerintah dengan masyarakat dalam bekerjasama menangani bencana kebakaran. Semakin solidnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat maka semakin maksimal pula penanganan bencana kebakaran seperti yang termuat pada penelitian Aziz Damanto (Aziz Damanto, 2019). Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa penanganan bencana kebakaran hutann dan lahan oleh BPBD Kabupaten Aceh Besar masih mengalami banyak keterbatasan mengakibatkan kegiatan penanganan tanggap darurat masih belum bisa dioptimalkan. Kurangnya monitoring dan evaluasi oleh BPBD Kabupaten Aceh Besar mengakibatkan kegiatan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan tidak bisa terukur sesuai yang diharapkan seperti yang ditulis Rangga Lamara (Rangga Lamara, 2020) pada penelitian

yang dilakukannya. Penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sangat sulit dilakukan terutama pemadaman maka dari itu diperlukannya program dan fasilitas yang mumpuni agar dapat ditanggulangi secara cepat dan maksimal seperti halnya yang diungkapkan Fatmah pada penelitiannya (Fatmah, 2019). Pentingnya pengembangan dan perluasan fungsi koordinasi yaitu kerjasama dengan instansi terkait maupun masyarakat agar dalam pelaksanaan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat menjangkau dan menambah lebih banyak sumber daya sehingga hasil pelaksanaannya dapat lebih maksimal, layaknya temuan Sugipto Beong dkk (Sugipto dkk, 2018).

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa peranan BPBD Kabupaten Aceh Besar dalam penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, namun belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tersapat hambatan-hambatan dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dibuktikan dari respon dari masyarakat yang baik kepada BPBD Kabupaten Aceh Besar. Harapan kedepannya BPBD Kabupaten Aceh Besar dapat melakukan penanganan bencana lebih baik lagi agar kerugian dan korban kebakaran hutan dan lahan dapat di kondisikan dengan baik. BPBD Kabupaten Aceh Besar juga harus lebih berupaya mengajukan penambahan anggaran dan melakukan perekrutan personil serta memberi pelatihan agar kerugian dari bencana kebakaran hutan dan lahan dapat segera di minimalisir.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya ketika melaksanakan penelitian dilapangan. Penelitian ini juga mengalami hambatan dalam memperoleh data karena banyaknya titik api yang tidak tercatat.

Arah Masa Depan Penelitian. Peneliti menyadari penelitian ini masih temuan awal, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penanganan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar untuk menemukan hasil yang lebih luas dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada seluruh anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, juga lembaga tercinta Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas ilmu dan keterampilan yang telah peneliti dapatkan serta semua pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W. C., Suryadiputra, I. n. n., Saharjo, B. hero, & Siboro, L. (2005). Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan. (B. hero Saharjo, Ed.). Bogor: Wetlands International - Indonesia Programme.
- Creswell J. W. (2013). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmanto,Azis (2019). Peran DINAS Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Dalam menanggulangi kebakaran di permukiman.
- FATMAH (2019). Model Mitigasi Kebakaran Berbasis Masyarakat
<https://www.mongabay.co.id> Pembukaan Lahan, Penyebab Terjadinya Karhutla di Aceh, diakses pada tanggal 4 september 2021 pukul 14.23 WITA
- Iskandar (2020). Peran Badan penanggulangan Bencana Daerah dalam smenangulangi bencana kebakaran di kecamatan Mandahara kabuapten Janjung Jabung Timur
- Lamara,Rangga (2020). Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB dalam penanggulangan Bencana Gempa Bumi
- Purwanto. 2007. "Letak.Geografis.Dan.Astronomis.Indonesia.Serta.Pengaruhnya." Ilmu Pengetahuan Sosial
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun Tentang penanggulangan bencana
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugipto beong, erwin resmawan, rita kalinggi. (2015). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(4).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana